

SYSTEMATISASI PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Suci Hartati¹, Chasan Ma'ruf²

¹ Institut Agama Islam An Nur Lampung

² Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta

sucihartati@an-nur.ac.id, hasanmaruf@staithawalib.ac.id

ABSTRACT

Tingkat peradaban suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh sistem pendidikannya. Telah terbukti bahwa suatu negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga memiliki tingkat peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial ekonomi, dan perkembangan budaya yang lebih tinggi. Menyesuaikan dan memperbaiki konten program pendidikan merupakan tantangan tersendiri, karena harus mengikuti kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang dan kehidupan individu yang akan bekerja di dalamnya. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berusaha untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan dengan memberikan sekolah kebebasan yang lebih besar untuk membuat keputusan sendiri dengan meningkatkan kemungkinan bahwa hal itu akan menghasilkan hasil yang terukur berkat struktur manajemen yang lebih ramping. Sekolah lebih mampu memenuhi kebutuhan individu murid mereka ketika mereka diizinkan otonomi yang luas atas anggaran mereka, kebijakan perekrutan, dan metodologi pengajaran. Dengan menjalankan kebebasan dan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya yang tersedia, manajemen berbasis sekolah berupaya meningkatkan efektivitas pendidikan. Pengelolaan kurikulum dan program pengajaran, pengelolaan staf pengajar, pengelolaan siswa, pengelolaan keuangan dan pembiayaan, pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam pendidikan, pengelolaan hubungan masyarakat, dan pengelolaan layanan khusus adalah semua aspek sekolah berbasis manajemen. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah diantaranya : Pertama, meningkatnya keinginan untuk cara hidup yang lebih demokratis sepanjang era reformasi merupakan faktor utama dalam keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Kedua, penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengutamakan kedaulatan daerah. Ketiga, kelompok yang berupaya melaksanakan Program Bersama Jaring Pengaman Sosial (JPS) hadir di banyak sekolah. Keempat, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tugas dan kewajiban Badan Bantuan Penyelenggara Pendidikan (BP3) agar lebih banyak lagi masyarakat yang berpartisipasi di sekolah anaknya.

Article Info

Article history

Received: 15 Maret 2022

Revised: 21 April 2021

Accepted: 19 Mei 2022

Keywords

Kepemimpinan,
Manajemen Berbasis
Sekolah, Pendidikan,
Proses Manajerial.

PENDAHULUAN

Kualitas sistem pendidikan suatu masyarakat dapat berdampak pada derajat peradabannya. Negara-negara tersebut dianggap maju jika masyarakatnya memiliki akses ke jenis pendidikan yang sering datang sebelum suatu negara mencapai tingkat yang

lebih maju dalam hal budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politiknya. Dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara efektif memberikan kewenangan dan kemandirian kepada daerah sesuai dengan

keinginan masyarakat. Daerah kabupaten dan kota diberikan kekuasaan dengan konsep desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, murni, dan akuntabel (Suparlan 2013:5).

Isu mendasar yang mempengaruhi relevansi pendidikan adalah kebutuhan untuk menyesuaikan dan meningkatkan materi pendidikan yang dapat digunakan di dalam program pendidikan agar sesuai dengan tuntutan yang terus berubah dari lingkungan perusahaan dan sosial yang berubah dengan cepat. Penerapan kurikulum yang lebih berorientasi pada tujuan, yang dimulai pada tahun 1975/76 dan berlanjut melalui perubahan lebih lanjut pada tahun 1984 dan 1994, merupakan salah satu hasil nyata dari inisiatif ini dan inisiatif lainnya. Dalam melakukannya, peneliti bermaksud untuk lebih menghubungkan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa dan tenaga kerja, dan menyatukan kurikulum dan kebijakan baru dalam domain pendidikan. Kurikulum yang berfokus pada hasil ini mungkin berguna dalam semua konteks pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga sekolah pascasarjana.

Departemen Agama (2005:7) menyatakan bahwa tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Kebebasan untuk menangani sumber daya, masukan publik, dan administrasi yang disederhanakan semuanya berkontribusi pada produktivitas yang lebih besar. Namun, MBS hanya dapat diwujudkan dengan bantuan staf terlatih dan terdidik yang dapat merampingkan sistem, menghilangkan birokrasi yang berlebihan, dan menginspirasi pekerja untuk menghasilkan hasil yang lebih baik.

Administrator, pengajar, dan siswa diberikan metode baru untuk memikirkan dan mengatasi masalah di kelas dan administrasi sebagai konsekuensi dari inisiatif, kreativitas, dan profesionalisme mereka sendiri. Karena kompleksnya masalah yang dihadapi sekolah-sekolah di Indonesia saat ini, membangun otonomi sekolah akan segera menjadi

tantangan. Oleh karena itu, diperlukan tahapan implementasi untuk menghindari konflik antar komponen dan unit pelaksana. Tujuan ini membutuhkan setidaknya tiga periode waktu: segera, menengah, dan jangka panjang. Akibatnya, metode baru untuk administrasi sekolah diciptakan, yang mendelegasikan kurikulum dan otoritas keputusan kepada lembaga individu. Manajemen Berbasis Sekolah adalah aliran pemikiran yang telah terbukti efektif di sejumlah negara maju, terutama Australia dan Amerika Serikat, dalam menghapuskan komisi dan mengatasi beragam masalah pendidikan.

Dengan memberi sekolah lebih banyak kelonggaran dalam menjalankannya, MBS mendorong peningkatan administrasi pendidikan dengan tujuan akhir untuk menghasilkan hasil yang nyata melalui praktik manajemen yang mapan. Sekolah dari semua tingkatan dan jenis akan dapat memperbaharui diri (self-reform) dengan meningkatkan kinerja dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, menjadikannya lembaga pendidikan organik demokratis yang kreatif dan inovatif. Prinsip MBS tetap tidak berubah, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan pilihan selama pilihan itu dibuat sesuai dengan tuntutan dan realitas proses belajar-mengajar. Menurut Syaiful Sagala, tingkat kewenangan ini memberikan sekolah kemampuan untuk (1) mengatur kurikulum, (2) mempekerjakan dan mengawasi pekerjaan fakultas dan administrator, dan (3) membuat pilihan administratif lainnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kepustakaan memerlukan membaca dengan teliti karya sastra yang relevan dan membuat catatan tentangnya sebelum

memasukkannya ke dalam kerangka teoretis yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk memperkuat fakta sehingga penulis dapat lebih efektif mengkaji perbedaan dan/atau persamaan antara teori dan praktik.

PEMBAHASAN

1. Memahami Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen adalah praktik menyelesaikan sesuatu dengan menyuruh orang lain melakukannya, seperti yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet dalam kutipan yang dikutip oleh Suparlan (2013: 41). Menurut definisi ini, tugas seorang manajer adalah mengawasi dan membimbing bawahan dalam mengejar tujuan jangka panjang organisasi. Menurut definisi operasional Ricky W., "efektif" mengacu pada kemampuan mencapai tujuan seseorang sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan "efisien" mengacu pada kebenaran, organisasi, dan ketepatan waktu dengan mana kegiatan seseorang dilakukan.

Namun, menurut Mulyasa (2004: 19), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah transfer kekuasaan yang luas ke tingkat sekolah. Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengelola sumber daya dan sumber pendanaan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan lebih responsif terhadap tuntutan lokal.

Firman Allah, dalam Al-Qur'an Al-Sajadah ayat 05 berikut ini:

"Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu."

Manajemen, "berbasis", dan "sekolah" membentuk akronim MBS. Manajemen yang efektif adalah metode pengalokasian dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai serangkaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 19 Sekolah adalah lokasi di mana orang dapat pergi untuk mempelajari hal-hal baru atau berbagi apa yang telah mereka pelajari dengan orang lain. Salah satu interpretasi yang mungkin dari manajemen berbasis sekolah adalah penggunaan sumber daya berbasis sekolah untuk proses pendidikan.

MBS, di sisi lain, dimaksudkan untuk memberikan sekolah banyak keleluasaan tentang bagaimana mereka mengelola dan membelanjakan uang, menurut Mulyasa (2004: 19). Akibatnya, sekolah dapat mengalokasikan dana berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai kebutuhan paling mendesak di masyarakat. Menurut Nurkolis (2003:5), MBS memberikan kekuatan yang signifikan kepada setiap sekolah.

2. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Kementerian Pendidikan Nasional RI menyatakan bahwa tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan model Multi-Partner, Multi-Benefit Management (MPMBM) adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong dan mendukung otonomi dan inisiatif sekolah dalam administrasi sumber daya yang tersedia. Kedua, melalui pengambilan keputusan kolaboratif, meningkatkan keterlibatan warga sekolah dan masyarakat luas dalam penyelenggaraan pendidikan. Kesimpulannya, ketiga, peran kepala sekolah di dalam sekolah harus diperluas. Keempat, mendorong sekolah untuk saling bersaing secara positif untuk meningkatkan hasil pendidikan. Lebih lanjut, Nurkolis (2003: 27) berpendapat bahwa MBS berpotensi meningkatkan prestasi siswa karena kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya dan personel dengan lebih baik, meningkatkan profesionalisme guru, melaksanakan reformasi kurikulum, dan melibatkan lebih banyak orang di masyarakat untuk terlibat dalam sekolah.

Namun, Mulyasa (2004: 13) berpendapat bahwa tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan hasil pendidikan seperti efisiensi, kualitas, dan pemerataan. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, keterlibatan masyarakat, dan perampingan administrasi semuanya berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi. Keterlibatan orang tua, kelonggaran administratif, peningkatan profesionalisme guru, adanya penghargaan dan konsekuensi sebagai kontrol,

dan faktor-faktor lain yang mendorong lingkungan belajar yang positif semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas. Pemerintah akan bertanggung jawab atas mereka yang kurang kompeten, sementara keadilan pendidikan akan membantu mendorong keterlibatan masyarakat di antara mereka yang mampu dan peduli. Mengingat filosofi di atas, jelas bahwa tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efektivitas pendidikan melalui otonomi dan kemampuan beradaptasi dalam administrasi sumber daya saat ini.

3. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dalam MBS, ada empat prinsip yang harus diingat, seperti yang digarisakan oleh Nurkolis (2003: 52):

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini didasarkan pada filosofi manajemen kontemporer, yang mengajukan beberapa jalan menuju solusi. Karena pentingnya adaptasi dalam MBS, adalah tanggung jawab warga sekolah untuk menjalankan sekolah sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekolah tidak dapat dikelola dengan kerangka yang seragam di seluruh kota, provinsi, atau negara karena keragaman latar belakang akademik dan sosial siswa, serta kompleksitas praktik pedagogis saat ini. Masalah yang muncul di lembaga pendidikan harus ditangani secara tepat waktu dan sesuai. Sementara beberapa lembaga pendidikan menghadapi tantangan yang sama, tanggapan mereka sangat bervariasi.

b. Prinsip Desentralisasi

Modernisasi administrasi sekolah telah disertai dengan kecenderungan luas menuju desentralisasi. Ide desentralisasi sejalan dengan gagasan keadilan. Filosofi dasar di balik desentralisasi adalah keyakinan bahwa masalah dan tantangan adalah bagian tak terelakkan dari pengelolaan dan pengajaran di sekolah

mana pun. Karena kompleksitas yang melekat, pendidikan adalah masalah yang paling baik ditangani melalui pendekatan desentralisasi.

c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri

Prinsip ini terkait dengan prinsip kesetaraan dan desentralisasi yang telah ada sebelumnya. Masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan memerlukan pendekatan individual untuk pemecahan masalah. Jika otoritas telah didelegasikan ke sekolah dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka sekolah dapat mengatasi masalah tersebut. Sekolah dapat menerapkan sistem manajemennya sendiri sekarang karena ia memiliki hak untuk melakukannya.

d. Prinsip Inisiatif Manusia

Pada dasarnya, ide ini mengakui bahwa orang bukanlah aset tetap, melainkan aset yang cair. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus-menerus menyelidiki, mengungkap, dan mengolah potensi sumber daya manusia. Institusi pendidikan yang lebih besar tidak bisa lagi menggunakan frase "staffing", yang berkonotasi hanya objek lembam. Manusia di lembaga pendidikan harus dipandang sebagai aset berharga yang dapat dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu diperlukan strategi HRD yang berkonotasi dinamis.

4. Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Setiap upaya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus berhasil mengelola banyak komponen. Dalam kerangka MBS, setidaknya ada tujuh aspek sekolah yang perlu dikelola dengan baik.

a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran

Peningkatan hasil pendidikan dapat dicapai dengan pendekatan sistematis yang dikenal sebagai "manajemen kurikulum." Karena kurikulum merupakan satu-satunya faktor yang paling penting dalam menentukan

keberhasilan upaya instruksional, administrasinya sangat penting, yaitu:

- Kegiatan perencanaan
- Kegiatan implementasi
- Kegiatan penilaian

b. Pendidik

Pendidik sangat penting bagi keberhasilan sekolah karena merekalah yang bertanggung jawab untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan siswa mereka melalui kombinasi pengajaran, pendampingan, dan penilaian.

c. Manajemen siswa

Istilah "manajemen siswa" mengacu pada setiap upaya yang dilakukan untuk mengendalikan anak-anak sejak mereka pertama kali mendaftar di sekolah hingga saat mereka meninggalkannya. Manajemen siswa, sebagaimana didefinisikan oleh Knezevis dalam Bambang, adalah layanan yang berfokus pada pengelolaan, pengawasan, dan layanan siswa baik di dalam maupun di luar kelas, mulai dari pengenalan awal dan pendaftaran hingga bantuan individual dengan hal-hal seperti pengembangan keterampilan dan perencanaan karir.

d. Manajemen keuangan dan pembiayaan

Keberhasilan atau kegagalan upaya pendidikan sebagian besar tergantung pada pengelolaan keuangan lembaga. Operasi pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian, seperti halnya lembaga pengelola pendidikan pada umumnya.

e. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan

Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya mengandalkan fasilitas infrastruktur untuk membantu mereka berjalan dengan lancar. Namun, proses pengelolaan infrastruktur jauh lebih penting. Kemampuan seseorang untuk berhasil menyelesaikan suatu proses kegiatan dapat dipengaruhi oleh proses manajemen "*Untuk kelancaran kinerja organisasi bersangkutan*". Setiap karyawan harus memiliki pemahaman

yang kuat tentang infrastruktur dan bagaimana hal itu berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus mereka karena manajemen infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan organisasi mana pun.

f. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat

Untuk memenuhi misi mereka sebagai lembaga yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, sekolah harus memenuhi keinginan dan kebutuhan siswa dan penduduk setempat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan sekolah, program apa yang ada, sumber daya apa yang tersedia, dan sebagainya. Demikian pula, sekolah memiliki kewajiban untuk memahami harapan, permintaan, dan kekhawatiran masyarakat.

g. Manajemen layanan khusus

Menurut Mulyasa (2004: 39), manajemen pelayanan khusus di sekolah dikembangkan dan diatur untuk mendukung atau membantu pembelajaran dan dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa. Layanan termasuk konseling dan saran, perpustakaan dan perawatan kesehatan, manajemen asrama dan kafetaria termasuk dalam kategori ini. Agar sekolah berhasil, sangat penting bahwa layanan ini ditangani secara efektif.

5. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Secara konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan berdampak pada peningkatan kinerja sekolah dalam hal kualitas, efisiensi pengelolaan keuangan, dan pemerataan melalui perubahan kebijakan desentralisasi di bidang-bidang seperti anggaran politik, pendidikan, administrasi, dan pendidikan (Fatah, 2004: 26). MBS bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta tujuan politik seperti membangun lingkungan yang lebih demokratis di kelas. Nanang Fattah menekankan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Fattah mengatakan MBS telah berhasil di Spanyol dalam meningkatkan keinginan dan kompetensi kepala sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Di tingkat kampus, mahasiswa dapat melihat demokrasi beraksi.

6. Strategi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Untuk sebagian besar, tidak ada metode yang terbukti benar yang dapat memastikan pengenalan MBS yang lancar di mana saja dan dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil untuk memperkenalkan MBS mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain, daerah ke daerah, dan bahkan sekolah ke sekolah di daerah yang sama.

Karena pelaksanaan MBS merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh komponen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka ditempuh pemecahan sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan oleh Slamet PH (2001) dalam Nurkolis (2003:132).

1. Kita harus terlebih dahulu memperkenalkan ide MBS kepada semua orang yang tinggal di komunitas sekolah dengan mengadakan seminar, mengadakan debat, mengadakan forum ilmiah, dan menggunakan media.
2. Dalam transisi dari administrasi top-down ke manajemen berbasis sekolah adalah memeriksa konteks sekolah dan masyarakat sekitarnya.
3. Membuat eksplisit hasil yang diinginkan dari implementasi MBS mengingat kesulitan yang sebenarnya harus diatasi.
4. Mengetahui departemen dan layanan apa yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan dari keadaan saat ini dan departemen dan layanan mana yang masih perlu diperiksa kesiapannya. Pengembangan kurikulum, tenaga

kependidikan dan non kependidikan, siswa, suasana akademik, hubungan sekolah, interaksi sekolah-masyarakat, fasilitas, dan fungsi lainnya semuanya berperan di sini.

5. Melakukan analisis SWOT untuk menilai status kesiapan masing-masing fungsi dan unsur-unsur penyumbangannya.
6. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah, dalam hal ini langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat fungsi yang belum siap menjadi siap.
7. Perlu membuat rencana dan program untuk mengimplementasikannya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
8. Melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan strategi sementara MBS.
9. Perhatikan bagaimana MBS berjalan dan bagaimana hasilnya.

7. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Menurut Levacic, sebagaimana dikutip Ibrahim Bafandhal, ada tiga ciri pembeda Manajemen Berbasis Sekolah yang membedakannya dengan bentuk-bentuk manajemen lainnya.

- a. Pemangku kepentingan di sekolah diberikan lebih banyak suara dalam keputusan kebijakan yang mempengaruhi belajar siswa.
- b. Manajemen Mutu Pendidikan, yang membahas semua aspek peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kurikulum, fakultas, pendanaan, fasilitas, penerimaan siswa, dan pendaftaran.
- c. Sementara sekolah telah diberi tanggung jawab lebih untuk meningkatkan pendidikan secara keseluruhan, kontrol pusat atas bagaimana kewajiban itu dilakukan tetap berada dalam yurisdiksi pemerintah, sehingga hal ini harus diatur.

Menurut Suryosubroto (2004: 197) mengutip Edmon, yang terakhir “berusaha memberikan banyak indikator yang

menunjukkan ciri-ciri gagasan Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS), seperti:

- a. Suasana ketentraman dan ketertiban di dalam kelas.
- b. Lembaga ini memiliki misi yang jelas dan harapan yang tinggi bagi mahasiswanya.
- c. Ada administrasi yang solid di institusi.
- d. Siswa, instruktur, dan administrator sama-sama memiliki standar kinerja yang sangat tinggi di kelas.
- e. Memastikan bahwa guru memiliki pelatihan yang mereka butuhkan untuk memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi baru.
- f. Aspek akademik dan administrasi yang berbeda secara teratur dinilai, dengan temuan yang dimanfaatkan dengan baik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas.
- g. Orang tua dan masyarakat sangat terlibat dan mendukung satu sama lain.

Menurut Saud, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2004: 14), karakteristik dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah: memberikan kebebasan yang besar kepada sekolah, mengundang anggota masyarakat dan orang tua siswa berprestasi untuk terlibat, memiliki administrasi sekolah yang demokratis dan dijalankan oleh para profesional terlatih, dan memiliki budaya kerja sama tim yang berkualitas tinggi.

Akibatnya, penjelasan selanjutnya akan dimulai dengan hasil, turun satu tingkat ke proses, lalu turun dua tingkat ke input, dengan output yang paling signifikan.

1) *Keluaran yang diharapkan*

Prestasi sekolah adalah outputnya. Prestasi sekolah merupakan prestasi yang dibawa oleh proses pendidikan. Kualitas, produktivitas, kemandirian, inovasi, keseimbangan kehidupan kerja, dan moral sekolah digunakan untuk mengukur kinerjanya. Prestasi akademik dan prestasi nonakademik adalah dua kategori besar di mana output secara umum dapat dibagi. Misalnya, produksi keberhasilan akademik

menaikkan NEM dari rata-rata tujuh menjadi delapan untuk tahun depan. Misalnya, hasil non-akademik mengangkat atletik dari keenam menjadi yang pertama di distriknya selama dua tahun berikutnya.

2) *Proses*

Sekolah yang efektif umumnya memiliki karakteristik proses sebagai berikut:

1) Proses belajar mengajar memiliki efektivitas yang tinggi

Sifat proses belajar mengajar yang menitikberatkan pada pemberdayaan siswa menunjukkan keberhasilan proses pembelajaran yang tinggi di sekolah yang menggunakan MBS. Proses pembelajaran lebih menekankan pada internalisasi apa yang seharusnya diajarkan agar tertanam dan berfungsi sebagai muatan hati nurani dalam kehidupan peserta didik (etika) daripada sekadar menguasai pengetahuan tentang apa yang diajarkan (logos). Hal ini juga lebih menekankan pada bagaimana siswa dapat belajar bagaimana belajar (learning to learn).

2). Kepemimpinan sekolah yang kuat

Adalah tanggung jawab kepala sekolah untuk mengkoordinasikan, memobilisasi, dan menyelaraskan semua sumber daya sekolah. Kemampuan sekolah untuk mencapai visi, maksud, tujuan, dan sasarannya melalui program yang disusun dan dilaksanakan dengan hati-hati sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah membutuhkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk dapat mengambil keputusan proaktif yang meningkatkan standar pendidikan.

3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib

Agar proses belajar mengajar berlangsung santai (enjoyable learning), lembaga pendidikan

menyediakan ruang yang aman dan tertata dengan baik. Dengan demikian, sekolah yang sukses secara konsisten mencari elemen yang berkontribusi pada suasana sekolah yang positif, seperti yang membuat kampus tampak aman, menyenangkan, dan rapi. Prinsip memainkan peran penting dalam skenario ini.

4) Manajemen staf pendidikan yang efektif

Tanpa anggota staf pendidikan yang berdedikasi dan bersemangat, terutama guru, ruang kelas tidak lebih dari sebuah bangunan. Akibatnya, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu dari penilaian pertama kebutuhan siswa melalui iterasi berikutnya dari perencanaan, pengembangan, evaluasi, kinerja, dan pembinaan hubungan kerja. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kecepatan yang memusingkan, sangat penting bahwa upaya untuk melatih dan mendidik guru terus berjalan. Dalam hal pendidikan, keberhasilan MBS sangat bergantung pada upaya stafnya.

5) Sekolah memiliki budaya mutu

Setiap orang yang tinggal di sekolah berbagi komitmen terhadap kualitas, memastikan bahwa semua tindakan didasarkan pada profesionalisme setiap saat. Contoh fitur budaya termasuk yang tercantum di bawah ini: (1) informasi kualitas digunakan untuk perbaikan daripada penilaian atau kontrol; (2) kewenangan terbatas pada tanggung jawab; (3) diikuti dengan penghargaan atau hukuman; (4) kerjasama didasarkan pada kolaborasi dan sinergi daripada kompetisi; (5) keluarga sekolah merasa aman dalam bekerja; (6) suasana keadilan ditanamkan; (7) upah yang sepadan

dengan nilai pekerjaannya; (8) warga sekolah merasa memiliki sekolah.

6) Sekolah memiliki kerja sama tim yang kompak, cerdas, dan dinamis

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menekankan pentingnya kerjasama di dalam kelas karena prestasi siswa adalah produk dari upaya semua orang daripada satu orang. Akibatnya, sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi, persatuan, dan kerja tim di kelas.

7) Sekolah memiliki kemandirian atau otoritas

Untuk memiliki otonomi atau kewenangan melakukan yang terbaik bagi sekolah, tanpa harus bergantung pada kepala sekolah atau figur otoritas lainnya, sekolah harus mandiri dalam hal sumber daya dan personelnnya. Semua tanggung jawab sekolah tidak dapat dipenuhi tanpa pendanaan yang memadai.

8) Partisipasi sekolah dan masyarakat

Semua warga sekolah dan masyarakat sekitar harus merasa diterima untuk terlibat dalam kegiatan sekolah.

9) Sekolah memiliki transparansi manajemen

Pihak-pihak yang terlibat selalu menjadi penanggung jawab ketika ada keterbukaan atau transparansi dalam bentuk pengambilan keputusan, penggunaan dana, dll.

10) Sekolah memiliki keinginan untuk berubah (psikologis dan fisik)

Semua anggota komunitas sekolah harus menyambut perubahan dengan tangan terbuka, asalkan transformasi yang dibawa adalah peningkatan status quo, dan terutama jika itu meningkatkan standar pengalaman pendidikan anak-anak.

11) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus

Dalam situasi ini, sekolah melakukan tinjauan komprehensif terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, dengan memperhatikan tidak hanya hasil dari proses pendidikan tetapi juga metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Tujuannya di sini adalah untuk membidik pada area di mana sekolah kurang sehingga mereka dapat diatasi dalam putaran pengembangan berikutnya.

12) Sekolah tanggap dan mengantisipasi kebutuhan

Jika sebuah sekolah ingin menanggapi berbagai dan beragam tujuan peningkatan kualitas yang muncul pada tahun tertentu, ia harus dapat memahami lingkungannya dan berhasil menavigasinya.

13) Sekolah memiliki akuntabilitas

Agar program yang dipilih menjadi efektif, sekolah harus memenuhi jenis akuntabilitas tertentu. Laporan kinerja diberikan kepada masyarakat, pemerintah, dan orang tua siswa sebagai bagian dari akuntabilitas ini.

14) Sekolah memiliki kemampuan untuk menjaga keberlanjutan

Sekolah yang efektif dapat terus eksis (berkelanjutan), baik dari segi keuangan maupun programnya. Umur panjang dari program sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan keberlanjutan suatu program. Kemampuan sekolah untuk menjaga jumlah dana yang dimiliki dan bahkan lebih banyak lagi merupakan tanda dari pendanaan yang berkelanjutan.

3) *Education input*

1) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas

Secara formal, sekolah menguraikan kebijakan umum, tujuan, dan sasaran yang terkait dengan kualitas. Kepala sekolah menjelaskan kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu sebelum mensosialisasikannya dengan semua

siswa untuk memastikan bahwa mereka tertanam dalam tindakan, perilaku, dan kebiasaan mereka sampai pada titik di mana komunitas sekolah memiliki karakter berkualitas.

2) Sumber daya tersedia dan siap

Sumber daya adalah komponen penting dari proses pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah. Tanpa sumber daya yang tepat, proses pendidikan juga akan gagal, yang juga akan mencegah tercapainya tujuan sekolah. Sumber daya harus siap dan tersedia, yang berarti sudah ada di sekolah dan dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang sangat minimum. Sasaran sumber daya manusia lainnya adalah efisiensi dan efektivitas; mereka tidak perlu mahal atau berlimpah asalkan digunakan secara efektif dan memahami kurikulum.

3) Memiliki harapan pencapaian yang tinggi

Ada banyak optimisme dan motivasi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja siswa dan institusi. Kepala sekolah sangat termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan pendidikan. Meskipun sumber daya sekolah yang minim, guru tetap mengharapkan murid mereka untuk tampil pada atau di atas tingkat rata-rata. Siswa perlu diilhami untuk tumbuh secara akademis dengan cara yang memaksimalkan kekuatan individu mereka. Sekolah dalam keadaan dinamis bertujuan untuk mengalahkan diri mereka sendiri sebagian karena harapan tinggi yang ditempatkan pada mereka oleh ketiga komponen tersebut.

4) Fokus pada pelanggan (terutama mahasiswa)

Semua aspek operasi sekolah harus dirancang dengan mempertimbangkan siswa, dan tujuan utama dari prosedur

yang berfokus pada pelanggan adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi anak-anak.

5) Memiliki masukan manajemen

Masukan dari administrator sekolah cukup untuk operasional sehari-hari. Beberapa input manajemen digunakan oleh kepala sekolah dalam menjalankan sekolah. Kepala sekolah akan lebih mampu menjalankan sekolah dengan umpan balik yang komprehensif dan mudah dipahami. Sasaran dapat dicapai dengan lebih andal dengan masukan berikut: tugas-tugas khusus dengan tenggat waktu yang jelas; rencana yang menyeluruh dan sistematis; program untuk membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan rencana; dan aturan main yang dapat diikuti siswa sebagai contoh kewarganegaraan sekolah yang bertanggung jawab.

4) *Faktor-Faktor yang Membantu dan Menghambat Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, dan Cara Mengatasinya.*

1) Faktor Pendukung Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Jika sumber daya yang diperlukan kurang, program yang dideklarasikan tidak akan berfungsi dengan baik. Baik variabel internal maupun eksternal dapat berperan dalam memberikan dukungan.

Dukungan politik, baik dalam bentuk kemauan politik sederhana atau undang-undang dan undang-undang yang lebih formal, sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi MBS. Variabel pendukung yang penting termasuk dukungan keuangan, dukungan untuk sumber daya manusia dan ide-ide mereka, fasilitas, dan infrastruktur lainnya (Nurkolis, 2004, hlm. 130).

Beberapa variabel, antara lain pertama, tuntutan kehidupan demokratisasi yang luas dari masyarakat di era reformasi, menjadikan ini sebagai momen yang

menjanjikan bagi keberhasilan MBS diimplementasikan di Indonesia. Kedua, implementasi UU Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang mengutamakan penguasaan daerah. Ketiga, banyak sekolah memiliki kelompok yang bekerja untuk melaksanakan Program Bersama Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah ingin memperluas tanggung jawab dan mandat Badan Penyelenggara Pendidikan (BP3) untuk melibatkan lebih banyak orang di dalam kelas (Nurkolis 2004: 247)

2) Faktor Penghambat Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Untuk mengikuti arus pengetahuan dan globalisasi yang konstan, dan untuk memenuhi kesulitan yang terus berkembang dari dunia yang rumit saat ini, manajemen profesional lembaga pendidikan adalah kebutuhan mutlak. Lembaga pendidikan menghadapi tantangan dalam administrasi mereka karena beratnya tugas yang harus mereka lakukan. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sekolah yang efektif meliputi:

a. Peserta didik

Mengutip Tim Dosen IKIP Malang (2003: 110), "jika kita melihat murid-murid kita, kita akan segera mengetahui bahwa mereka memiliki kecerdasan yang berbeda meskipun mereka memiliki usia kalender yang sama, tetapi kekuatan mentalnya tidak sama."

b. Pendidik

Kinerja seorang guru di sekolah dapat terhambat oleh lingkungan sosial psikologis yang tidak menyenangkan, kesehatan keluarga yang tidak memenuhi pedoman kesehatan, serta ketidakamanan pribadi guru dalam kesejahteraan finansial mereka sendiri.

c. Dana dan Infrastruktur

Sistem pendidikan Indonesia menghadapi tantangan karena sumber daya dan fasilitas yang tidak memadai.

Kurangnya sumber daya dan infrastruktur telah menyebabkan keterbelakangan banyak lembaga pendidikan.

Sumber daya masyarakat, seperti dukungan keuangan, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan siswa di sekolah. Keluarga dengan status sosial ekonomi yang relatif tinggi memenuhi lingkungan sosial sekolah, dan pemerintah daerah mendapat manfaat dari sumber daya alam, standar hidup yang tinggi, dan basis pajak yang besar, yang semuanya dapat berdampak pada keberhasilan akademik siswa.

d. Partisipasi masyarakat

Karena masyarakat menetapkan tujuan dan prioritas pendidikan, hal itu berdampak signifikan terhadap bagaimana sekolah dijalankan. Peningkatan keterlibatan orang tua dan pemahaman publik adalah dua faktor yang memastikan sekolah swasta akan ada untuk generasi mendatang. Fokus bantuan ini adalah pada penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis kepada mereka yang membutuhkan.

3) Faktor Pemecahan yang Menghambat Manajemen Berbasis Sekolah

a) Peserta didik

Pengelolaan, supervisi, dan pelayanan di dalam dan di luar kelas, dimulai dengan pengenalan pertama dan berlanjut melalui pertumbuhan akademik siswa secara penuh (dalam hal bakat, minat, dan persyaratannya). Meningkatkan pendidikan sangat penting karena memungkinkan setiap siswa untuk berkembang dengan kemampuan terbaiknya, mendorong instruktur untuk belajar tentang latar belakang unik siswa mereka, dan

meningkatkan antusiasme siswa dan guru untuk belajar dan mengajar.

b) Pendidik

Agar efektif dalam perannya sebagai manajer sekolahnya, kepala sekolah dalam skenario ini harus peka terhadap sumber daya yang tersedia dan keahlian fakultasnya. Antusiasme guru hanya bisa meningkat jika dikompensasi secara adil.

Menurut Mulyasa (2004:40), kompensasi diartikan sebagai “balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang dapat diukur dengan uang dan mempunyai kecenderungan untuk diberikan secara teratur.” Selain pembayaran moneter, pemberi kerja dapat memberikan manfaat seperti sewa gratis, penggunaan mobil perusahaan, dan akses ke fasilitas lain sebagai semacam kompensasi.

c) Dana dan infrastruktur

Hasibuan (2014: 5) berpendapat bahwa keuangan dan fasilitas memainkan peran penting dalam pertumbuhan lembaga pendidikan. Sekolah terkadang mendapatkan dana dari pemerintah antara lain untuk pembuatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk sarana fisik, peralatan pembelajaran, ruang belajar, dan penyelesaian buku pegangan siswa. Pemerintah melalui kantor wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kantor pusatnya sering memberikan perpustakaan buku-buku dan barang-barang perpustakaan lainnya, baik sebagai sumbangan atau sebagai tetes gratis.

d) Partisipasi masyarakat

Sudah menjadi rahasia umum bahwa keterlibatan masyarakat dalam administrasi dan pertumbuhan sekolah sangat penting untuk pencapaian tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Semakin masyarakat tercerahkan tentang pentingnya pendidikan anak-anak mereka, semakin mendesak bagi sekolah dan masyarakat untuk menjalin kemitraan. Tujuan bersama untuk meningkatkan prestasi akademik di kalangan siswa dan meminimalkan beban administrasi di kelas memotivasi kolaborasi (Ismaya 2015: 57).

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen berbasis sekolah memerlukan otonomi yang cukup besar bagi satuan pendidikan sehingga dapat mengelola sumber daya dan sumber pendanaannya serta mendistribusikan uang sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
2. Dengan kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya yang ada, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mutu pendidikan.
3. Manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen staf pengajar, manajemen siswa, manajemen sumber daya keuangan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen layanan khusus adalah bagian penting dari manajemen berbasis sekolah.
4. Tuntutan kehidupan demokrasi yang substansial dari masyarakat di era reformasi menjadi faktor pendukung tercapainya manajemen berbasis sekolah yang pertama. Kedua, otonomi daerah semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga, banyak sekolah yang

memiliki komite yang membantu pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Keempat, pemerintah ingin memperluas mandat dan tanggung jawab Badan Bantuan Penyelenggara Pendidikan agar lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan (BP3).

5. Siswa, guru, fasilitas, dan kepentingan luar semuanya berkontribusi terhadap masalah administrasi berbasis sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2005). Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Fattah, Nanang. (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy;
- Hasibun, Malayu. (2014). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara,
- Imron, Ali. (2011). Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara;
- Ismaya, Bambang. (2015). Pengelola Pendidikan, Bandung: Refika Aditama;
- Mulyasa, E. (2004). Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Nurkholis, (2003). Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: Grasindo;
- Suparlan. (2013). Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara;
- Suryosubroto, B. (2010). Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta;
- Tim Dosen FIP IKIP Malang. (2003). Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, Malang: Usaha Nasional.